

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil analisis data dari penelitian tentang mitigasi bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau, maka dapat ditarik kesimpulan:

4.1.1. Regulasi

Pemerintah daerah mengintruksikan keseluruhan instansi OPD dan termasuk jajaran staf/pegawai untuk menindaklanjuti bencana asap yang berkepanjangan yaitu Peraturan Gubernur Riau No 11 Tahun 2014 Tentang Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau, dalam aksi rencananya membentuk Badan Organisasi Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (PUSDALKARHTLA). Bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau pemerintah daerah dapat disimpulkan dalam membuat kebijakan/regulasi dan melibatkan *stakeholder* terkait untuk melakukan kegiatan mitigasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya masih butuh evaluasi kedepan, karena dirasa belum optimal.

Pada tahun selanjutnya, yaitu tahun 2015 pemerintah daerah lebih serius dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Riau No 61 tahun 2015 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan

Lahan yang mana dalam aksinya membentuk satgas (satuan tugas) khusus untuk melakukan kegiatan mitigasi dengan tetap mengacu pada Pusdakarhutla (Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan) dan Perkembangannya Pusdakarhutla yang berubah membentuk pos komando terpusat.

4.1.2. Program Pendidikan

Upaya mitigasi bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau dilakukan oleh pemerintah melalui program pendidikan. Program pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah adalah sosialisasi dan pelatihan dengan bekerjasama dengan seluruh institusi yang memiliki wewenang dan *stakeholder* yang terlibat.

Sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan sepanjang ini awalnya belum bisa direspon baik oleh masyarakat, akan tetapi melihat hal ini pemerintah semakin memasifkannya akhir-akhir tahun ini tahun 2016 dan terbukti efektif mampu bersama-sama masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi sumber bencana asap yaitu, akibat kebakaran hutan dan lahan.

4.1.3. Pengendalian Lingkungan

Bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau yang terjadi dibutuhkan pengendalian lingkungan untuk

penyelesaian akar masalah dalam kerusakan dan dampak yang terjadi, sehingga perlu mendapat perhatian khusus dalam upaya pencegahannya. Melihat hal ini pemerintah daerah bahkan pemerintah pusat sudah turun atau terjun langsung dalam melakukan monitoring dan koordinasi/informasi kepada seluruh lapisan elemen terutama masyarakat lokal, agar menjaga lingkungan dan tidak merusak ekosistem.

Melihat *output* dari monitoring dan informasi masih belum dirasa optimal dan efektif, sebab secara keseluruhan masyarakat masih sangat awam akan dampaknya dan kebutuhan ekonomipun menjadi kebutuhan mendesak dan secara tidak langsung pembukaan lahan besar-besaran terjadi setiap tahunnya. Bisa disimpulkan perlu adanya peningkatan kapasitas monitoring dan informasi kepada lapisan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan terkait juga perlunya evaluasi dalam memperbaiki hal ini.

Meningkatkan monitoring dan informasi tentunya akan menjadi tolak ukur sejauh mana bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi bisa diupayakan seminimal mungkin bisa ditangani dan hal ini terlihat ketika pemerintah bekerjasama dengan beberapa elemen seperti pemerintah pusat, aparat, instansi pemda, masyarakat dan lain-lainnya. Bahwa dapat disimpulkan

kegiatan mitigasi perlu ditingkatkan terutama dari segi operasionalnya.

4.2 SARAN

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka dapat di ambil beberapa saran/rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Riau diharapkan mampu mengintruksikan dan mengawasi juga mengevaluasi dalam melakukan kegiatan mitigasi bencana asap akibat kebakran hutan dan lahan dengan baik kedepan.
2. Seluruh *stakeholder* terkait yaitu, OPD (Organisasi Perangkat Daerah, Aparat/Aparat Hukum, Masyarakat dan lain-lain juga lebih diharapkan mampu memasifkan dan meningkatkan kegiatan mitigasi bencana asap akibat kebakran hutan dan lahan.
3. Regulasi yang dikeluarkan dalam melakukan kegiatan pencegahan dan penanggulangan diharapkan mampu di implementasikan dengan baik dan terkoordinatif